

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEDAGANG
DALAM PENGELOLAAN PASAR TERTIB UKUR (PTU)
(Studi pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro)**

(Skripsi)

Oleh

RIFKI IRAWAN



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEDAGANG DALAM MEWUJUDKAN PTU PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA METRO (Studi Pada Pasar Margorejo dan Pasar Kopindo)

Oleh

Rifki Irawan

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang dimulai pada sektor ekonomi, upaya pemerintah membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Guna membangun kembali citra baik sebuah pasar tradisional yang merupakan tolok ukur perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan keberhasilan koordinasi pemerintah daerah dengan pedagang dalam mewujudkan PTU pada pasar tradisional di Kota Metro. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data dan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi pemerintah Kota Metro dengan pedagang dalam pengelolaan Pasar Tertib Ukur sudah cukup baik dilihat berdasarkan empat indikator pengukuran koordinasi yaitu; Pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi, suasana persaudaraan dan semangat kerjasama yang besar dalam organisasi, kontak-kontak dan komunikasi yang cukup dan, koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian sudah berjalan cukup baik. Namun, pemanfaatan teknologi dalam memperluas kontak dan mempermudah akses komunikasi antar pihak masih belum dilakukan secara maksimal.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Koordinasi, Pasar Tertib Ukur.

ABSTRACT

REGIONAL GOVERNMENT COORDINATION WITH TRADERS IN REALIZING PTU TRADITIONAL MARKET IN METRO CITY (Study In Margorejo and Kopindo Market)

By

Rifki Irawan

Regional autonomy is a focal point that is important in order to improve the community welfare began in the economic sector , the efforts by the government of building and repairing public facilities such as traditional markets .In order to rebuild the image of either a traditional markets that is the yardsticks for the state economy .This study aims to to analyze and describe the success of coordination of regional governments to traders in realizing PTU on traditional markets in the city of Metro .The method used is a method of descriptive with a qualitative approach , data collection by interviews technique, observation and documentation. Data analysis using a technique reduction technique data and techniques used a technique of triangulation of a source of data is not tampered with.

This research result indicates that coordination city government of Metro with traders in market management orderly measuring views based on the four indicators of the measurement of coordination the division of tasks and works that clearly in organization, the atmosphere fraternity and the spirit of cooperation that is great in organization, contacts and communication that enough among the in the organizations and coordination established and be implemented as unit with plannin , coaching and control had run quite well. But, the utilization of technology in expanding contacts and facilitate access communication between sides were not be carried out optimally .

Keywords: *Local Government, Coordination, Market Orderly Measurement.*

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEDAGANG
DALAM MEWUJUDKAN PASAR TERTIB UKUR (PTU)
(Studi pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro)**

Oleh

RIFKI IRAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pedagang dalam Pengelolaan Pasar Tertib Ukur (PTU) (Studi pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro)**

Nama Mahasiswa : Rifki Irawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416041081

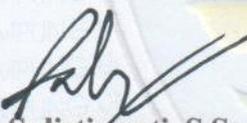
Jurusan : Administrasi Negara

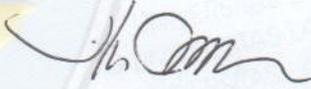
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Rahayu Sulistiawati, S.Sos., M.Si.
NIP 198710122 199512 2 001


Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP 19840630 201504 2 002

1. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

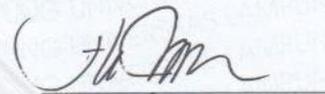
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

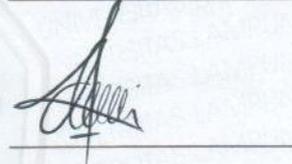
Ketua : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**



Penguji Utama : **Devi Yulianti, SAN., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, adalah:

Nama : Rifki Irawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416041081
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, 24 Mei 2019

Penulis



Rifki Irawan
NPM 1416041081

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Oktober 1996, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Hi. Marhali, S.E dengan Ibu Hj. Nurhayati. Penulis tinggal di sebuah rumah beralamat di jalan Cengkeh Gg Sumur Kucing No.4 Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa,

Bandar Lampung

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Al-Kautsar (2002-2008), SMP Negeri 25 Bandar Lampung (2008-2011), dan SMA YP Unila (2011-2014). Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (jalur tes). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Batu Tegi, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus (Tahun 2017).

Motto

“Allah tempat meminta segala sesuatu”

(QS. Al- Ikhlas: 2)

“Set Goals Say Prayers Work Harder”

(Paragonian)



Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan, serta kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjunganku
Nabi Muhammad SAW

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada orang-orang yang selalu berharga dan berarti dalam hidupku:

Ayahku (Hi. Marhali, S.E) dan Ibuku (Hj. Nurhayati)

Kedua orangtuaku yang dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil hingga mengantarkanku ke perguruan tinggi dan meraih cita-cita yang selama ini aku impikan.

Keluargaku

Kakak-kakak dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungannya ketika aku berada di dalam kesulitan, membimbingku dan menasihatiiku ketika aku hilang arah.

Para Pendidik

Para guru dan para dosen, atas ilmu, nasihat, bimbingan, kesabaran, waktu, dan arahan yang telah diberikan sehingga aku dapat menjadi pribadi yang lebih berani dalam mewujudkan impian dan cita-citaku.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila. Skripsi ini berjudul “ *Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pedagang dalam Pengelolaan Pasar Tertib Ukur (PTU)*”.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Syarief Makhya., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung;
2. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung;
3. Eko Budi Sulisty, S.Sos., M.AP. selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan serta selalu memberi motivasi.
4. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.SI. selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta selalu memberi motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Devi Yulianti, SAN., M.A. selaku pembahas yang telah memberikan kritik dan masukan positif untuk skripsi ini;
7. Kepada Papa dan Mamaku tercinta, Hi. Marhali, S.E & Hj. Nurhayati Terima kasih atas kasih sayang yang telah Mama dan Papa berikan kepada Rifki selama ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, pelajaran yang selama ini kalian berikan sehingga Rifki bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini diberikan untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AN ini aku bisa membahagiakan Papa dan Mama Amin
8. Terimakasih kepada kedua kakakku Udo M.Arie Syahputra, S.H dan Cikngah Winda Anggun Pratiwi, S.E., M.M Terima kasih atas motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara.
9. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ibu Intan Fitri Meutia, Prof. Yulianto, Pak Bambang, Pak Syamsul, Ibu Dian, Pak Nana, Ibu Meiliyana, Pak Simon, Ibu Dewi, Ibu Selvi, dan Ibu Anisa , terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
10. Pak Azhari dan Pak Johari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.
11. Dinas Perdagangan Kota Metro, yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian berlangsung;

12. Gelas Antik (Adi kurniawan, Ahmad Febrian, Alvin Agus, Andra, Andriyanto, Anggi Lestari, Anggi Setiawan, Anisa Utami, Annisa Yurida, Ari Novita, Arizal, Bella, Binter, Deni, Desriyanto, Dian, Dinda, Ditho, Dwi Septi, Anung, Ernada, Faiz, Fatra, Riany, Fatwa, Ferdian, Ferry, Gusty, Heni, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Intan, Istiqomah, Istie R, Julian, Funki, Marselin Daiska, Martiana, Maya, Megita, Meli, Arif Suhada, Fadly, Fazry, Ma'ruf, Reza, Wahyu Syawaldi, Mutiara, Nabila Aisyah, Nabila Cho, Nadya, Ni'mah, Nihan, Niza, Nur Arifah, Asih, Nur Muharani, Widi, Hasan, Nuridin, Nurlaila, Oci, Okta, Pranita, Rani, Refi, Regi, Ririn, Robi, Roi, Rydho, Sandi, Sangga, Satria Adi, Satria Sakti, Septika, Sintong, Suci, Tanicha, Triaz, Taufik, Tengku, Tiyasz, Tuti, Wahyu Hidayat,) Serta keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.
13. Terimakasih pada teman-teman SMAku (Angga, Apip, Beno, Doni, Faiz, Gani, Luthfan, M.Alghifari,S.H, Mutia Balkis S.Ikom, Riko)
14. Terimakasih pada teman-teman panceku (Ayu Monicha, Almaida Balqis, Armed, Fadel, Fiska FK, Indriyani) Yang telah banyak membantu, menyemangati serta memotivasi saya.
15. Terimakasih pada temen kampus Nurika Amalia S.Hub.Int yang telah banyak memotivasi di dalam skripsi ini.
16. Kepada Marlia Triani Putri A.md yang pernah membantu menyemangati dan memotivasi di dalam penulisan ini mengucapkan terima kasih sehingga

penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang pernah saudara berikan kepada penulis.

17. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya.

18. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 24 Mei 2019
Penulis

Rifki Irawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Konsep Organisasi	10
C. Tinjauan Tinjauan Tentang Koordinasi	12
1. Pengertian Koordinasi	12
2. Ciri-ciri Koordinasi	13
3. Tujuan Koordinasi	15
4. Jenis-jenis Koordinasi	16
5. Karakteristik Koordinasi Yang Baik.....	18
D. Tinjauan Pelayanan Publik	20
E. Tinjauan Tentang Pasar.....	21
1. Pengertian Pasar	21
2. Pasar Tertib Ukur	26
3. Pengelolaan Pasar	27
F. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	33

D. Jenis Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Keabsahan Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Gambaran Umum Kota Metro.....	39
2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Metro.....	42
3. Gambaran Umum Pasar Margorejo dan Kopindo.....	45
B. Hasil Penelitian	49
1. Pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi.....	50
2. Suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi.....	54
3. Kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang orang dalam organisasi.....	57
4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian.....	61
C. Pembahasan.....	70
1. Pembagian Tugas dan Pekerjaan yang Jelas dalam Organisasi.....	71
2. Suasana Persaudaraan dan Semangat Kerja Sama yang Besar dalam Organisasi.....	72
3. Kontak-kontak dan Komunikasi yang cukup Diantara Orang-orang dalam Organisasi.....	74
4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian.....	76
5.	
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pelaku Usaha di Pusat Perdagangan/ Pasar Kota Metro Tahun 2017	2
2. Penelitian Terdahulu	8
3. Data Informan	34
4. Persebaran Kelurahan di Kota Metro	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	29
2. Peta Administratif Kota Metro.....	41
3. Lokasi Dinas Perdagangan Kota Metro	44
4. Piagam Penghargaan Pasar Margorejo Tahun 2012	46
5. Piagam Penghargaan Pasar Kopindo Tahun 2013	48
6. Surat Keputusan Walikota Metro.....	53
7. Arsip Pamflet yang digunakan Dinas Perdagangan	60
8. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro.	64
9. Dokumentasi Jadwal Kegiatan Tera Ulang Alat UTTP oleh Dinas Perdagangan Kota Metro Tahun 2018	65
10. Piagam Penghargaan Pasar Margorejo Tahun 2012	69
11. Piagam Penghargaan Pasar Kopindo Tahun 2013	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang dimulai pada sektor ekonomi. Baik sektor formal maupun sektor informal merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah bahkan suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik untuk mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kota Metro sebagai salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Lampung, memiliki banyak pusat perbelanjaan yang terletak di tengah kota, dan beberapa pasar tradisional pendukung yang tersebar di berbagai daerah perbatasan permukiman warga. Tujuan utama perbatasan permukiman itu adalah sebagai sentra pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki nilai jual yang dapat ditawarkan kota dengan populasi penduduk beragam ini.

Kawasan perdagangan tersebut terlihat dari data pusat Kota Metro yang didapatkan dari Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Metro tahun 2017 dapat dilihat dari tabel ini:

Tabel 1. Data Pusat Perdagangan / Pasar di Kota Metro Tahun 2017

No.	Nama	Jumlah Toko/Kios/Los	Luas	
			Tanah	Bangunan
1	Kawasan Niaga Metro Mega Mall	779	2,53 Ha	2,4 Ha
2	Kawasan Perdagangan Terpadu Kota Metro (Nuban Ria, Kopindo, Terminal Kota Metro)	229	-	16. 650 m ²
3	Pertokoan Sumur Bandung	61	6659m ²	L1: 9.106m ² L2: 1846m ²
4	Pertokoan Jl Jendral Sudirman	31	4.296m ²	-
5	Pasar Cendrawasih	453	9.373m ²	-
6	<i>Shopping Center</i>	360	11.063m ²	-
7	Pasar Modern Tejo Agung	192	11.557m ²	-
8	Pasar Tani Tejo Agung	69	-	-
9	Pasar Grosir Tejo Agung	64	-	-
10	Pasar Loak Tejo Agung	34	-	-
11	Pasar Sumbersari Bantul	47	4.800m ²	238m ²
12	Pasar Margorejo	339	7.200m ²	-
13	Pasar Ganjar Agung	20	-	-

Sumber : Data Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, 2017

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat terlihat bahwa jumlah toko atau usaha yang ada di Kawasan Perdagangan Terpadu memiliki bangunan terluas yaitu 16.650 m² dengan 229 unit termasuk ruko, kios dan los juga termasuk kawasan di Pasar Kopindo. Pasar Kopindo sendiri memiliki 58 unit yang terbagi dengan ruko 2 lantai ukuran (4x13,5)m sejumlah 46 unit dan Pasar Margorejo Metro Selatan sejumlah 339 yang sudah termasuk ruko, kios dan los. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan banyaknya pedagang/pelaku usaha yang ada di Kota Metro, data tersebut belum termasuk data pedagang warung maupun usaha kecil yang menyebar yang terdapat di berbagai kelurahan di Kota Metro

Pasar-pasar yang terdapat di Kota Metro merupakan aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasar menjadi salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di suatu daerah, pasar juga merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam otonomi daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal di pasar tradisional pada bulan Agustus 2018 diperoleh keterangan bahwa terdapat permasalahan seperti fasilitas yang kurang mendukung atau sarana fisik pasar yang kurang memadai, ketidaktertiban pedagang karena pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang tidak teratur yang disebabkan kebersihan dan penataan yang kurang diperhatikan. Keadaan tempat parkir yang seringkali memakan bahu jalan mengakibatkan kemacetan di sekitar pasar sering terjadi, kondisi fisik pasar yang sudah tua, kebersihan pasar yang tidak terjaga, bau dan tidak tertata rapi. Sisi buruk tentang pasar yang lain ialah ketidaktepatan ukur timbangan yang biasa dicurangi oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak lazim melalui alat ukur timbangan. Hal ini sering terjadi pada pasar tradisional yang menyebabkan buruknya pandangan terhadap pasar tradisional. Masalah ini juga merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah demi terciptanya daerah yang jujur.

Pada kurun waktu 4 tahun, Kota Metro mencapai keberhasilan dalam pengelolaan pasarnya, yakni mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada dua pasar yang ada di Kota Metro yaitu, Pasar Margorejo dan Pasar Kopindo sebagai Pasar Tertib Ukur. Penghargaan Pasar Tertib Ukur diberikan kepada kedua pasar tersebut melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan. Penghargaan tersebut diberikan karena mampu memenuhi kriteria Pasar Tertib Ukur. Salah satu kriteria yang telah dipenuhi oleh pasar Margorejo dan Kopindo yakni, telah melakukan Tera atau pengukuran terhadap UTTP (Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya) dengan baik. Pemerintah Kota Metro selaku pelaksana, pengawas dan pengambil keputusan dinilai mampu melaksanakan Tera ulang secara rutin dan berkepanjangan.

Tera ulang yang dilakukan Pemerintah Kota Metro merupakan suatu agenda yang wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun melalui Dinas Perdagangan Kota Metro. Tujuan diadakannya Tera ulang secara rutin ini untuk menciptakan kenyamanan pada konsumen dan masyarakat agar tidak merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang berusaha mendapatkan keuntungan yang tidak lazim melalui alat ukur timbangan. Penghargaan tersebut mampu dipertahankan selama kurun waktu dua (2) tahun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh Pasar Margorejo dan untuk tanggal 31 Oktober 2013 oleh Pasar Kopindo. (Sumber: <http://info.metrokota.go.id/prestasi-pasar-margorejo-dan-pasar-kopindo-kota-metro/> diakses pada 03 April 2018)

Penghargaan yang didapatkan oleh Kota Metro melalui kedua pasar Margorejo dan Kopindo tersebut merupakan percontohan yang baik oleh pemerintah kota dalam pengelolaan organisasi yang berkaitan dengan koordinasi yang terjadi antara pemerintah kota dengan pedagang dan masyarakat. Pengelolaan pasar tradisional tidak dapat hanya dilakukan oleh suatu lembaga saja atau pemerintah saja. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pengusaha (produsen) atau pedagang dan juga masyarakat (konsumen) dalam menjalankan tujuan Pemerintah Kota Metro. Melalui Dinas Perdagangan dan Pasar, yakni dengan adanya kesadaran pentingnya koordinasi, berkolaborasi, koordinasi, di dalam setiap tugas dan pekerjaan. Sehingga, diharapkan memungkinkan terjadinya efektivitas dalam sebuah pekerjaan. Sejauh ini Pemerintah Kota Metro telah melakukan koordinasi dengan banyak pihak, seperti halnya pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah untuk kesediaannya membantu SDM tenaga teknisi tera ulang alat ukur timbangan yang belum cukup memadai di Kota Metro.

Koordinasi tercipta untuk mengadakan pembagian tugas atau kerja dan fungsi masing-masing lembaga (pemerintah atau swasta) untuk saling bekerjasama menciptakan situasi yang nyaman dan dapat diterima oleh konsumen atau masyarakat. Seperti dalam penelitian Miharti (2018) koordinasi penting dilakukan karena ketersediaan fasilitas yang cukup memadai namun pelayanannya atau kegiatannya masih belum maksimal. Hal inilah pihak penyelenggara dan pihak yang ikut serta melakukan koordinasi dapat menghasilkan hasil yang baik.

Adanya peranan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan pasar untuk mengembalikan citra pasar tradisional menjadi terpercaya, pemerintah Kota

Metro melalui Dinas Perdagangan melakukan perbaikan pasar mulai dari renovasi sarana dan prasarana pasar serta pengawasan alat ukur dan pengukuran barang yang dijual oleh produsen kepada konsumen. Berkaitan dengan penghargaan yang didapatkan oleh dua pasar induk di Kota Metro membuat Pemerintah Kota Metro semakin giat untuk mengelola pasar-pasarnya demi terciptanya Visi dan Misi Kota Metro “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja”.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti meneliti tentang koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pedagang dalam mewujudkan Pasar Tertib Ukur (Studi Pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro) sebagai pasar yang mendapatkan penghargaan Tertib Ukur oleh Direktorat jendral (Dirjen) Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pedagang dalam mewujudkan PTU pada Pasar Tradisional di Kota Metro terutama pada Pasar Kopindo dan Margorejo?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah: “Menganalisis dan

menggambarkan keberhasilan koordinasi pemerintah daerah dengan pedagang dalam mewujudkan PTU pada pasar tradisional di Kota Metro.”

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian tentang koordinasi Dinas Perdagangan dan Pasar beserta Pedagang di pasar tradisional.

2. Praktis

Penelitian ini menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran dan saran-saran bagi Dinas Perdagangan Kota Metro dalam meningkatkan kualitas Pasar dan Pedagangan dalam pengelolaan PTU. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, terdapat beberapa bahan yang berkaitan dengan koordinasi pemerintah Kota Metro dengan Pedagang dalam pengelolaan pasar tertib ukur, sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tujuan	Kesimpulan
1.	<i>Koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota di Bandar Lampung</i>	Pranita Miharti, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis koordinasi Dinas Perhubungan dalam pelayanan jasa transportasi angkutan kota, dan untuk melihat faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan dalam berkoordinasi meningkatkan pelayanan angkutan kota.	Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan hanya satu yang belum berjalan dengan optimal.
2	<i>Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Ketuban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser,</i>	Nur Fajriana, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Ketuban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, yang mengarah pada pembangunan	Secara keseluruhan bahwa Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Ketuban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dalam pelaksanaannya

			dibidang fisik.	dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, namun kemampuan kepala desa harus ditingkatkan mengenai koordinasi internal melalui koordinasi vertikal dengan aparat desa, koordinasi horizontal dengan BPD, koordinasi diagonal dengan LPM dan koordinasi eksternal dengan perusahaan swasta, kerjasama yang dilakukan kepala desa sebagai bentuk upaya menuju kemajuan Desa Suatung Keteban dalam proses pembangunan fisik.
3	<i>Analisis strategi pengelolaan pasar johar oleh dinas pasar kota semarang</i>	Bekti Rahayu, R. Slamet Santoso, Maesaroh. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.	Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang harus dilakukan oleh Dinas pasar kota Semarang dalam meningkatkan pengelolaan Pasar Johar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pasar johar yang telah dilakukan belum optimal dalam memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dibutuhkan strategi baru. Strategi yang disarankan adalah meningkatkan fungsi dan peran <i>stakeholder</i> dalam mengembangkan potensi terutama daya saing pasar johar, mengembangkan kerjasama dengan pemerintah/ swasta untuk meningkatkan

				<p> pelayanan sarana prasarana, peningkatan koordinasi antara dinas, pemerintah dan pedagang untuk melakukan perbaikan bangunan atau sarana prasarana sesuai aturan yang ada, mengembangkan kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk mengatasi kekurangan anggaran, dan melakukan kerjasama dengan pedagang dalam penataan untuk mengatasi kurangnya daya tampung. </p>
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian di atas, yang membedakan dengan penelitian ini ialah fokus koordinasi yang dilakukan yakni koordinasi pemerintah daerah dengan pedagang dalam mengelola pasar tradisional dengan baik yang dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada pasar tradisional yang ada di Kota Metro.

B. Konsep Organisasi

Robbins dalam Sutrisno (2010: 141) organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan yang dikoordinasikan secara sadar

mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Karena organisasi merupakan kesatuan sosial, pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk tidak hanya sekadar meminimalkan kelebihan (*redundancy*), namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan. Sedangkan organisasi menurut Griffin dan Morhead adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Wexley dan Yulk (1977) dalam Sutrisno (2010: 141) mendefinisikan bahwa organisasi adalah pola hubungan antar manusia yang diikutsertakan dalam aktivitas yang membuat satu sama lain saling tergantung untuk suatu tujuan tertentu.

Gerloff dalam Kusdi menyatakan karakteristik utama organisasi dapat diringkas sebagai 3P, yakni: *purposes*, *people*, dan *plan*. Sesuatu disebut organisasi bila memiliki;

- a) tujuan (*purposes*);
- b) terdiri beberapa anggota (*people*), dan
- c) rencana (*plan*) untuk mencapai tujuan. Dalam aspek "rencana" terkandung maksud semua hal (seperti sistem, struktur, desain, strategi, dan proses) yang dirancang untuk menggerakkan unsur manusia dalam mencapai tujuan.

Efektivitas organisasi menurut Etzioni dalam Keban (2004:140), efektivitas organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya (*goals*), sedangkan secara lebih umum, sebagaimana dikatakan

oleh Kimberly, menyangkut semua kondisi yang diperlukan organisasi untuk tetap bertahan hidup atau yang lebih dikenal dengan istilah “*survival*“. Pengertian efektivitas organisasi menurut Gitosudarmo dalam Sutrisno (2010:143), mengungkapkan konsep efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output proses juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya, dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan pada lingkungannya

C. Tinjauan Tentang Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Hasibuan (2014: 85) mendefinisikan, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6m) dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling bergantung. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar mendapat kesepakatan.

Sedangkan menurut Brech dalam Hasibuan (2014: 85) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Handoko (2011: 195) berpendapat koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.

Handayani (1982: 88) mengatakan bahwa koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan. Menurut Money dan Railey dalam Handayani (1982: 88) koordinasi merupakan sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Penulis menyimpulkan berdasarkan beberapa pengertian koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menyetarakan kesamaan tiap langkah dan kegiatan oleh antar organisasi agar tercapai suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini koordinasi dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana koordinasi yang dapat menentukan langkah dan mengambil keputusan, dan pihak lainnya seperti swasta dan masyarakat.

2. Ciri-ciri Koordinasi

Ciri-ciri koordinasi menurut Handayani (1982: 89) :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continue process*). Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Hal ini berarti pimpinan harus mengatur usaha-usaha/ tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan dari usaha/ tindakan meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

3. Tujuan Koordinasi

Sebuah kegiatan pasti memiliki tujuan, koordinasi juga memiliki tujuan.

Menurut Ndraha (2011: 295) tujuan koordinasi yaitu :

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai pihak dalam organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Sedangkan tujuan koordinasi menurut Hasibuan (2014: 87) :

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis, kearah sasaran perusahaan.
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
- e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah organisasi.
- f. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran organisasi.

Koordinasi sangat penting pada setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi, sebab tanpa ada koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Adanya koordinasi diharapkan akan membuat keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga tiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras. Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang serasi, selaras dan seimbang. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

Menurut Thompson dalam Handoko (2011: 196), terdapat (3) tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*); apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi saling tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang mengusahakan untuk hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana satuan-satuan organisasi harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

4. Jenis-jenis Koordinasi

Menurut Handayani (1982: 90-92) terdapat jenis-jenis koordinasi diantaranya yaitu:

1) Koordinasi Intern

Koordinasi Intern yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

2) Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern.

a) Koordinasi Fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja fungsional.

b) Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari orang lainnya. Misalnya: Departemen Pemerintah RI, di mana setiap Departemen hanya menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidangnya masing-masing. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut diperlukan kerjasama antar Departemen atau antar Departemen dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

5. Karakteristik Koordinasi yang baik

Menurut Syamsi (1994: 116) koordinasi yang baik harus dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi.

Pembagian tugas berkaitan dengan proses membagi tugas ke dalam suatu unit-unit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Semua tugas dispesialisasikan ke dalam derajat yang sama, karena tidak semua orang dapat melakukan sesuatu, tetapi beberapa tugas sangat berbeda dengan tugas yang lainnya. Salah satu manfaat utama dari mengorganisasikan tugas adalah bahwa kelompok orang yang bekerja sama melalui pembagian kerja mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri.

2. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi. Manusia memiliki kepribadian yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Olehkarena itu manusia akan selalu melakukan interaksi dan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Kerjasama juga dilakukan agar individu dapat mempermudah dalam melakukan kegiatannya, dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan semangat kerja sama yang besardalam organisasi maka hasil yang didapatkan maksimal.

3. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang-orang dalam organisasi. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang baik, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan pemrosesan informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan sebagainya untuk mempermudah proses koordinasi tersebut. Tugas-tugas memerlukan kontak dan tingkat koordinasi yang tinggi antara atasan dengan bawahan. maka seharusnya menggunakan rentang kendali yang sempit.
4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian. Perencanaan yang dimaksud yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jika sejak awal telah melakukan perencanaan dengan tepat, maka proses-proses berikutnya akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi yangdicapai juga akan maksimal. Jika rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi telah ditetapkan, kemudian dilakukan proses pembimbingan agar rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dalam kegiatan koordinasi, pengendalian memiliki peran yang sangat penting. Fungsi proses pengendalian ini adalah untuk mengevaluasi tujuan yang telah dicapai, dan apabila tujuan tidak

tercapai dengan baik, maka dapat dicari mengenai faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan.

D. Tinjauan Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern. Hal ini sesuai dengan pendapat Sepriyatna dalam Anggara (2012: 567) yang menyatakan bahwa masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis, dan menjamin adanya kepastian. Selain itu, Moenir dalam Anggara (2012: 568) mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Kotler dalam Rusli (2015: 165) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (*intangible*) dan tidak menghasilkan kepemilikan. Kotler berpandangan bahwa yang namanya pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam bidang kehidupan tertentu untuk kepentingan umum.

Dilihat dari segi bentuknya, pelayanan tidak hanya berbentuk aktifitas atau manfaat, tetapi bisa pula berbentuk pelayanan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Murdick dkk dalam Anggara (2012 : 570) bahwa pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang memproduksi atau menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kebutuhan atau keperluan psikologis.

Definisi lain yang dikemukakan sejumlah ahli, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa “Pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik”. Menurut undang-undang ini pelayanan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu: Pelayanan administratif dan pelayanan barang. Penyelenggaraan pelayanan publik sektor pemerintah diselenggarakan oleh unsur seperti: penyelenggaraan negara, penyelenggara ekonomi negara, koperasi dan lembaga-lembaga pelayanan yang ditunjuk oleh negara.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang bersifat jasa di bidang ekonomi, maka pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa yang dilakukan pada suatu tempat yang dapat melakukan interaksi terbuka yang dipantau dan diawasi oleh pemerintah langsung melalui otonomi daerah yaitu sebuah pasar. Berbagai kegiatan serta program-program yang dilakukan pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan publik bersifat jasa di bidang ekonomi ini untuk kesejahteraan masyarakatnya.

E. Tinjauan Tentang Pasar

1. Pengertian Pasar

Kata pasar diduga berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “pancawarna”. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar

merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari derma.

Menurut Stanton dalam Swastha (2002: 50) bahwa pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Menurut Mankiw (2002: 33) pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang mejadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Pengertian pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya para penjual dan pembeli serta terjadi proses jual beli secara langsung yang melalui proses tawar menawar (sumber: <http://info.metrokota.go.id/perda-perdagangan-pasar/> diakses pada 10 Mei 2018). Bentuk bangunan pasar tradisional ini berupa kios, los, atau gerai. Pasar dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat yaitu adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen) memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Adapun fungsi pasar menurut Fuad dkk (2000: 10) antaranya:

a. Sarana distribusi

Fungsi utama dari pasar adalah merupakan tempat dimana terjadinya proses distribusi, baik distribusi bagi produsen maupun konsumen. Dengan adanya pasar produsen bisa memasarkan dan menjual barang-barang hasil produksinya dan konsumen bisa mendapatkan kebutuhannya melalui barang-barang yang ada di pasar. Pada intinya pasar menjadi jembatan penghubung antara produsen dan konsumen, produsen yang telah memproduksi barang-barang bisa menjual dan menawarkan pada konsumen dan konsumen yang memiliki kebutuhan bisa terbantu dengan adanya barang-barang tersebut.

b. Pembentuk harga atau penentu nilai

Pasar berfungsi untuk membentuk dan menetapkan harga dengan tujuan di semua tempat dan kalangan harga itu sama tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku seperti harga disesuaikan dengan geografis, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian yang berupa permintaan dan penawaran serta masih banyak lainnya. Itu semua dalam ruang lingkup besar, sedangkan dalam ruang lingkup kecil fungsi pasar yang menjadi pembentuk harga dilihat ketika ada proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual yang menghasilkan harga minimal namun tetap menguntungkan bagi produsen atau penjualnya.

c. Sebagai sarana untuk promosi

Pasar menjadi salah satu tempat paling efektif untuk digunakan sebagai sarana promosi. Dikarenakan dalam pasar terdapat banyak orang dan kerumunan yang sedang mencari kebutuhannya. Hal inilah yang

dijadikan produsen sebagai ajang untuk pengenalan produk-produk yang dimilikinya dengan harapan banyak konsumen yang tertarik akan barang produksinya tersebut.

d. Tempat mencari keuntungan

Adanya keberadaan pasar, membuat para produsen bisa menjual barang dagangannya yang akan memberikan pemasukan bagi mereka para produsen. Pasar disini sangat membantu karena semua pihak tidak perlu membangun dari awal jaringan konsumsi atau sulit mencari konsumen, namun dalam pasar masalah tersebut akan hilang karena dalam pasar sudah terdapat satu kesatuan antara produsen dan konsumen dimana semua saling mencari keuntungan baik dari segi moral maupun materil.

e. Pembentukan kreatifitas

Hadirnya pasar bisa membentuk kreatifitas tinggi bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen kreatifitas dan inovasi wajib dilakukan untuk selalu menarik konsumen untuk membeli hasil produksinya, selain itu kreatifitas harus tetap dilakukan sesuatu yang baru harus diciptakan agar tetap bisa bersaing dan bertahan di pasar. Sedangkan untuk konsumen kreatifitas mereka akan terlatih untuk melatih kepekaannya dalam memilih dan memutuskan hasil produksi atau barang yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

f. Sebagai tempat mempererat silaturahmi

Sebuah Pasar pasti akan terjadi sebuah komunikasi ataupun interaksi antar pihak yang bersangkutan. Tidak disadari hal sederhana tersebut dapat menjadi kegiatan silaturrahi antar individu. Selain kegiatan atau

kebutuhan ekonomi terpenuhi kebutuhan sosialpun akan terpenuhi pula. Selain itu dengan adanya pasar bisa menjadi fasilitas dimana bertemunya dua pihak yang saling memiliki tujuan bertemu untuk membuat suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam kegiatan jual beli dan tawar menawar.

g. Sarana pembangunan nasional

Pasar memiliki kaitan erat dengan pembangunan nasional, karena dalam pasar tersedia bahan, alat atau sumber daya lain yang bisa digunakan sebagai bahan dasar pembangunan. Selain itu pasar juga menjadi salah satu pemasok dana bagi pembangunan yang ada yakni dari pajak yang mereka bayarkan. Inilah yang mendasari fungsi pasar sebagai sarana pembangunan nasional.

h. Meningkatkan pemasukan negara

Pasar menjadi salah satu pihak penyumbang dana terbesar bagi negara, karena dalam pasar hampir semuanya berkaitan dengan uang dan keuntungan. Kegiatan produksi menghasilkan uang yang harus dibayarkan sebagian untuk pajak, kegiatan konsumsi juga menghasilkan uang yang pada akhirnya harus disisihkan untuk membayar sewa lokasi atau sewa tempat dan masih banyak lainnya. Bisa dibayangkan pemasukan negara akan membaik jika kondisi pasar negara tersebut juga baik. Jadi pada dasarnya kehadiran pasar bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yakni kesejahteraan masyarakat.

i. Mengontrol kegiatan ekonomi

Keberadaan pasar sangat membantu pemerintah atau negara dalam mengontrol segala kegiatan dan alur perekonomian negara. Bisa kita bayangkan ketika tidak ada pasar maka konsentrasi pemerintah akan terpecah belah dan hal ini menyulitkan bagi mereka untuk mengontrol dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Jadi dengan demikian dengan adanya pasar bisa membantu pemerintah fokus dalam menjalankan alur perekonomian dengan pengawasan yang terfokus pada satu titik.

2. Pasar Tertib Ukur

Pasar tertib ukur merupakan suatu program yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pasar tertib ukur ini merupakan turunan dari daerah tertib ukur yang sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Kota Bandung. Di Provinsi Lampung untuk daerah tertib ukur belum bisa dilaksanakan karena masih kurangnya sumberdaya terutama sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Di Provinsi Lampung sendiri memiliki banyak jenis pasar, baik pasar tradisional ataupun pasar modern, namun hanya ada 2 pasar yang mendapat predikat Pasar Tertib Ukur (PTU) yang berada di Kota Metro.

Pasar tertib ukur sendiri ialah pasar yang memenuhi standar untuk bersaing dengan pasar modern, dengan tujuan kepuasan pelanggan (konsumen) dan mengembalikan citra pasar tradisional yang tergeser dengan adanya pasar modern untuk mensejahterakan masyarakat terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar terus berkembang dengan produk sendiri dan bersaing dengan produk lainnya.

Menurut Sekertaris Dinas Perdagangan Kota Metro Bapak Pansuri,S.H pasar tertib ukur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedagang yang

menggunakan ukuran timbangan takaran, dimulai dari pedagang sayuran sampai dengan pedagang emas atau semua pedagang yang menggunakan alat ukur demi terciptanya ketertiban perdagangan dan kenyamanan konsumen.

3. Pengelolaan Pasar

Pengelolaan pasar yang berdasarkan pada Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar, yang dijelaskan pada pasal 24 sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) Pasar milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak ketiga.
- 2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelataran/los/kios/toko;
 - b. fasilitas pasar seperti MCK; dan
 - c. kekayaan lainnya yang tidak berupa tanah yang terdapat di area pasar.
- 3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah status kepemilikan.
- 4) Jangka waktu penyewaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- 5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan

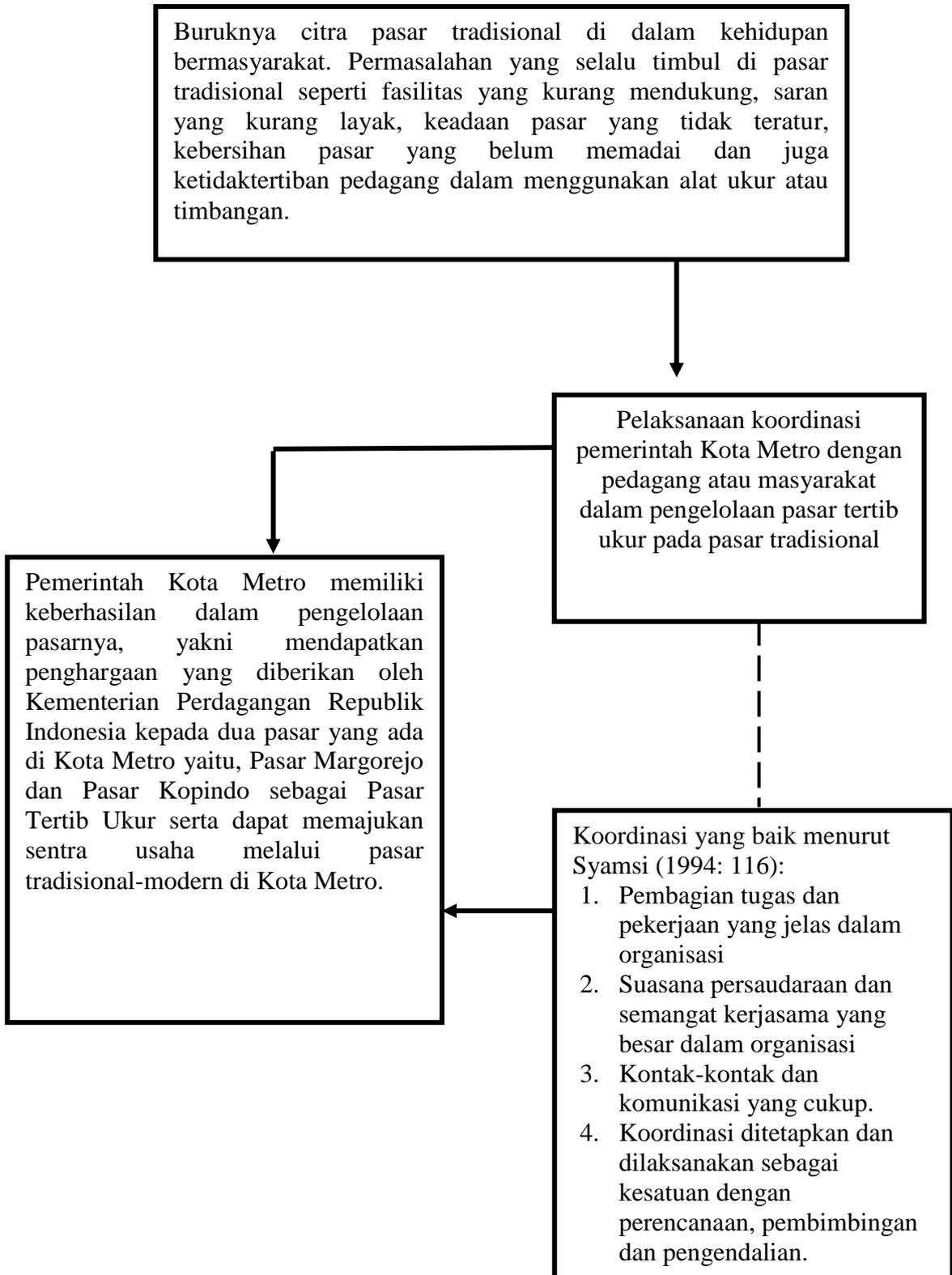
- d. hak dan kewajiban para pihak.
- 6) Pemindahtanganan sewa kepada pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala SKPD.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

F. Kerangka Pikir

Pasar tradisional memiliki citra yang buruk di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kalangan masyarakat ekonomi menengah keatas. Permasalahan yang selalu timbul di pasar tradisional seperti fasilitas yang kurang mendukung, saran yang kurang layak, keadaan pasar yang tidak teratur, kebersihan pasar yang belum memadai dan juga ketidaktertiban pedagang dalam menggunakan alat ukur atau timbangan. Kecurangan yang dilakukan pedagang dengan menggunakan alat ukur timbangan demi mendapatkan keuntungan yang tidak lazim sering terjadi di pasar-pasar tradisional.

Oleh sebab itu pemerintah Kota Metro memiliki wewenang sendiri untuk mengatur ketertiban tersebut. Hasil dari kegiatan tersebut Kota Metro mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada dua pasar yang ada di Kota Metro yaitu, Pasar Margorejo dan Pasar Kopindo sebagai Pasar Tertib Ukur. Berikut ini adalah kerangka penelitian ini:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: data diolah oleh peneliti, 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, menurut Moleong (2012: 6) ialah jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal utama dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2012: 92) yaitu bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan. Di dalam penelitian kualitatif ini hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Metro dengan pedagang dalam pengelolaan pasar tradisional untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau daerah. Dengan

menggunakan indikator untuk mengukur koordinasi yang baik menurut Syamsi (1994: 116) adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi.

Pembagian tugas berkaitan dengan proses membagi tugas ke dalam suatu unit-unit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Semua tugas dispesialisasikan ke dalam derajat yang sama, karena tidak semua orang dapat melakukan sesuatu, tetapi beberapa tugas sangat berbeda dengan tugas yang lainnya. Salah satu manfaat utama dari mengorganisasikan tugas adalah bahwa kelompok orang yang bekerja sama melalui pembagian kerja mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri.

2. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi.

Manusia memiliki kepribadian yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu manusia akan selalu melakukan interaksi dan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Kerjasama juga dilakukan agar individu dapat mempermudah dalam melakukan kegiatannya, dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi maka hasil yang didapatkan maksimal.

3. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang-orang dalam organisasi.

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang baik, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan pemrosesan informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan sebagainya untuk mempermudah proses koordinasi tersebut. Tugas-tugas memerlukan kontak dan tingkat koordinasi yang tinggi antara atasan dengan bawahan, maka seharusnya menggunakan rentang kendali yang sempit.

4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian.

Perencanaan yang dimaksud yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jika sejak awal telah melakukan perencanaan dengan tepat, maka proses-proses berikutnya akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi yangdicapai juga akan maksimal. Jika rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi telah ditetapkan, kemudian dilakukan proses pembimbingan agar rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dalam kegiatan koordinasi, pengendalian memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi proses pengendalian ini adalah untuk mengevaluasi tujuan yang telah dicapai, dan apabila tujuan tidak tercapai dengan baik, maka dapat dicari mengenai faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, dan Pasar Tradisional Margorejo serta Kopindo. Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Metro dikarenakan di Kota Metro inilah yang mendapatkan penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur yang diberikan langsung oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan di Provinsi Lampung.

D. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Purhantara (2010: 79) sumber data terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung pada lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang paling independen terhadap semua teknik pengumpulan data adalah: wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Purhantara (2010) adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Koordinasi Pemerintah Kota Metro dengan pedagang dalam pengelolaan pasar tertib ukur.

Tabel 3. Data Informan

No.	Nama	Jabatan/Peran	Waktu wawancara	Informasi yang didapat
1	Bapak Pansuri, S.H	Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Metro	Kamis, 23 Agustus 2018	Terkait pembagian tugas dan tanggung jawab bidang dan anggota bidang dalam struktur Dinas Perdagangan
2	Ibu Jahrab. S.IP	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan	Kamis, 23 Agustus 2018	Terkait dengan pengawasan kepada pedagang dan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan jual beli dipasar.
3	Ibu	Kepala Seksi	Selasa, 18	Terkait dengan

	Masyani, S.IP.	Pembangunan, Pengembangan dan Kemitraan	September 2018	pengelolaan sarana dan prasana yang sudah disediakan.
4	Bapak Erwani, S.Sos.	Kepala UPT Pasar Wilayah II	Selasa, 18 September 2018	Terkait hal-hal yang berhubungan langsung dengan pedagang di masing-masing wilayah.
5	Ibu Elita	Pedagang Sayur di Pasar Margorejo	Rabu, 19 September 2018	Kritik dan saran yang dirasakan oleh pedagang dan tentang kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan di pasar tradisional dalam kegiatan kunjungan Dinas Perdagangan.
6	Bapak Suryanto	Pedagang Ikan di Pasar Margorejo	Rabu, 19 September 2018	
7	Ibu Sumini	Pedagang Buah di Pasar Kopindo	Kamis, 20 September 2018	
8	Bapak Mizar	Pedagang Daging di Pasar Kopindo	Kamis, 20 September 2018	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

2. Observasi

Menurut Jorgensen dalam Tresiana (2016: 51) observasi merupakan teknik atau metode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitiannya yang melukiskan hal-hal terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tertib ukur di Kota Metro.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Bungin dalam Purhantara (2010: 80) adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Pada penelitian ini dokumen yang didapatkan adalah dokumen-dokumen seperti foto-foto kegiatan pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan dan Pasar dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan pasar tertib ukur di pasar-pasar

yang ada di Kota Metro, Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Meterologi Legal, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Daerah Lainnya, dan Keputusan WaliKota Metro Nomor 596/KPTS/D-18/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan KIR Alat-alat Ukur Takar Timbang Perlengkapannya Dinas Perdagangan Kota Metro Tahun Anggaran 2018.

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Keegiatannya meliputi penyusunan data, menafsirkan dan menginterpretasi data. Menyusun data, berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau katagori. Tafsiran, artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep (Tresiana: 2016: 61). Kegiatan analisis data dimulai dengan berikut ini:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, mendiskusikan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini peneliti memilah data yang dibutuhkan dalam penelitian koordinasi antara pemerintah daerah Kota Metro dengan pedagang dalam Pengelolaan Pasar Tertib Ukur pada Pasar Kopindo dan Pasar Margorejo Kota Metro.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian teks naratif dan foto atau gambar sejenisnya.

c. *Conclusion drawing/verification*

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil inti sari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data dalam Moleong (2012:8) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan data yang valid didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada dua kriteria yang digunakan yaitu :

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Koordinasi pemerintah Kota Metro dengan pedagang dalam pengelolaan Pasar Tertib Ukur (Studi pada Pasar Margorejo dan Pasar Kopindo di Kota Metro), maka peneliti mengemukakan simpulan bahwa koordinasi pemerintah Kota Metro dengan pedagang dalam pengelolaan Pasar Tertib Ukur sudah cukup baik. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di jabarkan dalam penelitian ini, dapat di simpulkan dalam beberapa hal yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang telah di tetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Pemerintah daerah Kota Metro dalam setiap tugas dinilai sudah cukup baik. Pemerintah daerah dengan pedagang dalam proses mewujudkan PTU pada pasar tradisional di kota Metro terutama pasar Margorejo dan Kopindo telah melakukan beberapa kegiatan koordinasi dalam bentuk perencanaan, pembimbingan dan pengendalian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara turun ke pasar langsung secara berkala. Dinas Perdagangan melakukan kerjasama dengan para pedagang untuk membangun sarana dan prasarana yang ada agar tercipta keadaan nyaman yang dapat dirasakan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

2. Selain melakukan kegiatan dan bekerjasama dengan pedagang, anggota Dinas Perdagangan berkolaborasi dengan tim koordinasi untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan PTU pada pasar Margorejo dan Kopindo di Kota Metro. Hal tersebut terwujud dalam bentuk penghargaan dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan sebagai Pasar Tertib Ukur kepada Pasar Kopindo dan Pasar Margorejo dan berkembangnya pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern di Kota Metro.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pedagang di Pasar Margorejo dan Kopindo: guna mempermudah jalannya penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkoordinasi terutama kepada pedagang yang terdapat di beberapa pasar di Kota Metro akan lebih mudah jika terdapat satu atau dua pemimpin atau ketua kelompok pada satu pasar yang bertugas untuk bertanggung jawab menyampaikan dan menjelaskan informasi yang diberikan pemerintah kepada pedagang. Juga sebagai “jembatan” sebagai tempat bertanya atau sebagai tempat pengaduan jika terdapat suatu masalah, yang nantinya akan disampaikan kepada pihak pemerintah dengan baik.
2. Dinas Perdagangan Kota Metro: teknologi informasi sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal dan baik. Salah satunya dengan cara membuat *website* yang dapat diakses oleh seluruh anggota maupun

pedagang sehingga dapat mempermudah masuknya gagasan atau saran yang diberikan oleh masyarakat.

3. Dinas Perdagangan Kota Metro; kejelasan sanksi atau hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar aturan terutama pihak pengembang yang sering mengabaikan aturan-aturan pengelolaan pasar. Harusnya lebih ditegaskan kembali tentang sanksi-sanksi yang akan diterima dan terus diupayakan untuk meningkatkan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Wahyu, dkk. 2007. *Ekonomi : Jilid 3*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV PustakaSetia.
- Basu, Swastha. 2002. *Azas-azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 50-51.
- Edy, Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fuad, Sugiarto, Nurlala, H. 2000. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia
- Gregory, Mankiw. 2002. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno. 1982. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong J, Lexy. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik yang Responsif)*. Bandung: CV Adoya Mitra Sejahtera.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Taliziduhu, Ndraha. 2011. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahann Baru*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 1993. *Manajemen, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tresiana, Novita. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara

Sumber Lainnya

- Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan
- Profil Pasar Kota Metro (2017) Bidang Pasar, Dinas Perdagangan Kota Metro
- Website Pemerintah Kota Metro (<https://data.metrokota.go.id/2017/07/17/data-pelaku-usaha-yang-ada-di-pusat-perdagangan-pasar-se-kota-metro-tahun-2015/>), diakses pada 03 April 2018, (<http://info.metrokota.go.id/prestasi-pasar-margorejo-dan-pasar-kopindo-kota-metro/>) diakses pada 03 April 2018. (<http://info.metrokota.go.id/perda-perdagangan-pasar/>) diakses pada 10 Mei 2018
- Artikel pentingnya koordinasi dalam berorganisasi, Nugroho, Imam, 2016 (<https://erudisi.com/pentingnya-koordinasi-berorganisasi/>) diakses pada 20 September 2018